



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 1 AGUSTUS 2025



RINGKASAN BERTA HARI INI

Pembangunan RSUD Sedati Telan Anggaran Rp 60 Miliar

SIDOARJO - Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati resmi dimulai sejak Senin (28/7). Proyek rumah sakit tipe D yang berdiri di bekas lokasi Puskesmas Sedati ini dibangun tiga lantai dengan kapasitas 50 tempat tidur. Anggaran pembangunannya disepakati Rp miliar. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Sidoarjo dr Rahmi Afiyanti Nisaul Khoiro mengatakan, pengerjaan konstruksi diberi tenggat 150 hari kerja. "Sekarang masuk tahap pembangunan," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dr Laksmi Herawati Yuwana



DESEMBER SELESA! Para pekerja mulai membangun RSUD Sedati kemarin (21/7). Nantinya akan dibangun selinggi 3 lantai berkapasitas 50 tempat tidur.

tina menyampaikan, anggaran pembangunan RSUD Sedati mencapai Rp 60 miliar. Kontrak kerja dengan pelaksana proyek ditandatangani pada pertengahan Juli lalu. "RSUD ini dibangun tiga lantai dengan kapasitas 50 tempat tidur, sesuai standar rumah sakit tipe D," ungkapnya. (eza uzi)

Pembahasan PAK Bergulir di Tengah Perbedaan Sikap Eksekutif-Legislatif

Dewan Yakin Bisa Disahkan

SIDOARJO - Meskipun berbeda pendapat terkait bisa atau tidaknya pembahasan PAK APHID 2025, namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yakin bisa disahkan.

Hal ini mengingat tidak banyak hal yang bisa dirumuskan dalam PAK. "Nah, itu yang harus kita perhatikan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.



PERBULAN APHID DPRD Sidoarjo membahas PAK APHID 2025 kemarin (28/7).



Yati Perti Kertu, Wakil PAK, bisa disahkan. (eza uzi)

Minggu Depan Dibahas oleh Komisi I DPRD Sidoarjo, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman, mengatakan, pembahasan PAK APHID 2025 akan dibahas pada minggu depan.

Saya sampai saat ini belum menerima surat rekomendasi Kemendagri, itu bisa menjadi landasan pertimbangan, meski bukan dasar hukum,"

M. ANUR RAHMAN, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dan Ketua Panitia Rayat dan Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Pemkab Butuh Rekomendasi Kemendagri untuk Laksanakan PAK

HINGGA kemarin (31/7), Pemkab Sidoarjo masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri untuk melaksanakan PAK APHID 2024.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Perwakilan DPRD Sidoarjo yakin bisa disahkan. "Kita yakin bisa disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, M. Anur Rahman.

Gegangan Banjir, Pemkab Kutub Bersihkan Sungai Kanal Porong

PORONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus melakukan pembersihan rutin di Sungai Kanal Porong. Seperti yang dilakukan pada Selasa (29/7), Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Sidoarjo kembali menurunkan satu alat berat dan dua truk pengangkut sampah untuk membersihkan area sungai yang berada di titik crossing Jalan Raya Porong.



ANTISIPASI BANIR, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus melakukan pembersihan rutin di Sungai Kanal Porong.

lisis, Satuan Tugas (Satgas) Sungai juga dikerahkan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo turut membantu kegiatan ini.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo, Dwi Eko Septono, menjelaskan bahwa normalisasi Sungai Kanal Porong dilakukan secara rutin setiap minggu. Tumpukan sampah yang tersangkut di bawah jembatan menjadi fokus utama pembersihan.

"Saat ini debit air di Kanal Porong menurun karena adanya sistem giliran pemberian air (gilir atas dan gilir bawah), sehingga sampah

• Ke Halaman 10

Bupati Suhandi Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Desa Med...

Bupati Suhandi salurkan bantuan beras untuk warga Desa Med...

Bupati Suhandi salurkan bantuan beras untuk warga Desa Med...

Bupati Suhandi salurkan bantuan beras untuk warga Desa Med...

BUPATI DAN WABUP KOMPAK BERSATU MONITOR PENYALURAN BANTUAN PANGAN DI SIDOARJO

SIDOARJO, PAK KLIK - Mengingat pentingnya bantuan pangan di masa-masa sulit, Bupati Suhandi dan Wakil Bupati (Wabup) Mimik Indiyana kompak memantau langsung ke lokasi penyaluran beras.

Bupati Suhandi memantau penyaluran bantuan pangan di Desa Widi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/7). Bupati Suhandi dan Wakil Bupati Mimik Indiyana memantau langsung ke lokasi penyaluran beras.



Bupati Suhandi dan Wakil Bupati Mimik Indiyana memantau langsung ke lokasi penyaluran beras.

Bupati Suhandi memantau penyaluran bantuan pangan di Desa Widi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/7).

Bupati Suhandi memantau penyaluran bantuan pangan di Desa Widi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/7).

Bupati Suhandi memantau penyaluran bantuan pangan di Desa Widi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/7).

Bupati Suhandi memantau penyaluran bantuan pangan di Desa Widi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/7).

Bupati Suhandi memantau penyaluran bantuan pangan di Desa Widi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/7).

Bupati Suhandi memantau penyaluran bantuan pangan di Desa Widi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/7).

Bupati Suhandi memantau penyaluran bantuan pangan di Desa Widi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/7).



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

MITRA

Hubungan Kami Baik-Baik Saja

BUPATI Sidoarjo, Subandi, menegaskan hubungannya dengan Wakil Bupati Mimik Indiyana sampai saat ini tidak ada masalah. Subandi menyatakan tidak ada konflik dengan pasangannya di pemerintahan Sidoarjo tersebut.

Bupati Subandi mengatakan dirinya tidak ingin menuruti isu ajakan konflik yang dihembuskan oleh dan dari siapapun.

“Siapa yang berkonflik, hubungan kami baik-baik saja, saya dan Bu Mimik tidak ada masalah,” ujarnya, yang



Bupati Sidoarjo,
Subandi

▶▶ ke halaman 11

Hubungan Kami Baik – Baik Saja

● Sambungan hal 1

dalam kesempatan itu juga didampingi Sekda Sidoarjo Feny Apridawati, Asisten 1 M. Ainur Rahman, Asisten 3 dr Atok Irawan dan Kepala Inspektorat Andjar Surjadiyanto.

Pengakuan yang sangat penting tersebut, disampaikan ketika menerima tamu dari para aktivis dan tokoh masyarakat Sidoarjo, yang mengatasnamakan Non Blok, Rabu (30/7) kemarin, di ruang offroom Setda Sidoarjo.

Orang nomor satu di Pemkab Sidoarjo tersebut dengan tegas mengatakan tidak ada konflik antara dirinya dengan Wabup Mimik Idayana.

Dirinya juga tidak mau warga masyarakat Sidoarjo setiap hari disuguhi dengan isu dan tontonan yang menurutnya tidak baik tersebut.

Setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, dirinya bersama Wabup Mimik Idayana, hanya ingin melayani dan mensejahterakan warga Sidoarjo.

“Kami hanya ingin melaksanakan tugas dengan baik dan bisa selamat,” ujarnya.

Menurut Bupati Subandi, warga masyarakat Sidoarjo jangan terus-terusan disuguhi tontonan demo. Akibatnya jalannya Pemerintahan bisa terganggu. Para ASN Sidoarjo tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau Pemerintahan sampai terganggu, tentu saja yang rugi adalah rakyat Sidoarjo.

Terkait penolakan laporan pelaksanaan pertanggung jawaban APBD tahun 2024 oleh pihak DPRD kabupaten Sidoarjo, Subandi mengatakan melakukan berbagai komunikasi dengan pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai, sebelum dilakukannya rapat Paripurna. Namun tetap saja ditolak.

Subandi sempat mengatakan bahwa LPP APBD 2024 lalu sebenarnya sudah diperiksa oleh BPK dan memperoleh Opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kategori WTP Kabupaten Sidoarjo tersebut, menurut Subandi, termasuk terbaik di Provinsi Jawa Timur.

Subandi menyatakan dirinya ingin bekerja sesuai aturan, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena di Kabupaten Sidoarjo, sudah ada 3 Bupatinya tersangkut dengan masalah korupsi.

“Apapun resikonya saya tidak takut. Selama menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan. Sehingga saya dan wakil bupati, akan bisa tenang dalam bekerja melayani rakyat Sidoarjo,” komentarnya. [kus.gat]

Pemkab Sidoarjo Pastikan Bantuan Beras Tepat Sasaran

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan bantuan pangan beras dari pemerintah pusat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu.

"Jangan sampai bantuan tersebut salah sasaran atau diterima oleh yang tidak berhak, karena bantuan ini tujuannya untuk membantu ekonomi warga dalam mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari," kata Bupati Sidoarjo Subandi dalam keterangannya di Sidoarjo, Rabu.

Subandi menyatakan ia memantau penyaluran bantuan pangan di tiga desa di Kecamatan Gedangan, yakni Desa Tebel, Desa Reboansikep, dan Desa Wedi. Sementara Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana memantau penyaluran di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, dan Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono.

Subandi menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras kali ini merupakan alokasi bulan Juni dan Juli dengan jatah dari pemerintah sebanyak 10 kilogram per bulan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ia juga meyakinkan bahwa kualitas beras bantuan yang diberikan sangat baik dan layak dikonsumsi. Oleh karenanya ia meminta beras yang diterima dapat dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual.

Selain memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, Subandi juga ingin memastikan bahwa masyarakat juga terlindungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ia meminta jika masih ada masyarakat yang belum terdaftar agar segera menemui kepala desa setempat demi meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendaftar kepersertaan BPJS Kesehatan.

Pesan serupa disampaikan Mimik saat memantau bantuan pangan beras di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran dan Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono.

Ia memastikan proses pembagian berjalan tertib dan sesuai ketentuan serta memastikan beras bantuan memiliki kualitas dan kondisi layak konsumsi dalam jumlah yang sesuai. (ant/rus)



Bupati Sidoarjo Subandi saat membagikan beras bantuan pemerintah pusat sebesar 10 kilogram per bulan bagi setiap KPM, di Sidoarjo, Rabu (30/7/2025).

Pembahasan PAK Bergulir di Tengah Perbedaan Sikap Eksekutif-Legislatif

Dewan Yakin Bisa Disahkan

SIDOARJO - Meskipun Pemkab dan DPRD Sidoarjo beda pendapat terkait bisa atau tidaknya pengesahan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2025, namun tahapan pembahasan PAK tetap dilakukan.

Kemarin (31/7), Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan nota penjelasan raperda perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo. Subandi mengungkapkan, penyusunan perubahan itu berdasarkan kebu-

tuhan. Menurut dia, pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi regulasi. "Dengan pertimbangan pembangunan daerah," ungkapnya.

Dia menjelaskan sejumlah poin tentang keuangan daerah. Mulai target pendapatan sampai alokasi anggaran. Termasuk perubahan yang diperlukan.

Minggu Depan Dibahas oleh Komisi
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menyampaikan, rapat



PERUBAHAN APBD: Bupati Sidoarjo Subandi (dua dari kanan) bersama Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (kanan) dalam sidang paripurna terkait nota penjelasan Raperda perubahan APBD 2025 kemarin (31/7).

itu merupakan tindak lanjut dari rapat badan musyawarah (banmuss). Nota tersebut akan mulai dibahas pekan depan. "Diswali komisi dengan mitra OPD terkait," ujarnya.

Terkait perubahan anggaran keuangan (PAK), pihaknya optimis dapat berjalan lancar. Pemkab sudah melakukan

pengajuan ke provinsi. "Otomatis perkada akan jalan setelah dua minggu," jelasnya.

Nasih mengaku belum mendapat informasi terkait hasil konsultasi ke Kemendagri. Oleh karena itu, pihaknya akan terus menjalankan tahapan pembahasan. "Misalnya Kemendagri setuju, kalau pem-

bahasan tidak jalan malah akan kalang kabut," tuturnya.

Bagaimana jika nantinya tidak bisa disahkan? Nasih menyebut dewan akan kembali berdiskusi. Kondisi itu dinilai sama dengan penolakan LPJ APBD 2024 sebelumnya. "Yang pasti kami yakin PAK bisa disahkan," tandasnya. (edi/uzi)



Yang pasti kami yakin PAK bisa disahkan."

ABDILLAH NASIH
Ketua DPRD Sidoarjo



Saya sampai saat ini belum menerima surat rekomendasi Kemendagri, itu bisa menjadi landasan pertimbangan, meski bukan dasar hukum."

M. AINUR RAHMAN
Asisten 1 Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pemkab Sidoarjo



- 1 Bupati menyampaikan nota penjelasan raperda perubahan APBD 2025 kemarin (31/7)
- 2 DPRD akan memulai tahapan pembahasan PAK mulai Minggu (3/8)
- 3 DPRD meyakini PAK tetap dapat disahkan meski LPJ APBD 2024 disahkan lewat Perkada
- 4 Pemkab konsultasi ke Kemendagri dan Pemprov soal PAK
- 5 Pemkab belum mendapatkan surat dari Kemendagri untuk rekomendasi PAK

Pemkab Butuh Rekomendasi Kemendagri untuk Laksanakan PAK

HINGGA kemarin (31/7), Pemkab belum menerima rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal PAK.

Asisten 1 Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman mengatakan, surat rekomendasi Kemendagri tersebut bisa menjadi landasan pertimbangan pengesahan PAK jika perda pertanggungjawaban APBD 2024 ditolak.

Ainur mengungkapkan, pihaknya sudah mengirimkan draf perkada ke Pemprov Jatim. "Draf Perkada dalam aturannya disampaikan maksimal tujuh hari setelah penolakan LPJ APBD. Kami tanggal 23 Juli

sudah sampaikan ke Gubernur," ungkapnya.

Menurutnya, jika pertanggungjawaban APBD 2024 disahkan melalui Perkada maka PAK tidak bisa dilaksanakan. (eza/uzi)

Jawa Pos

BUPATI DAN WABUP KOMPAK BERSATU MONITOR PENYALURAN BANTUAN PANGAN DI SIDOARJO

Sidoarjo, Pojok Kiri.

Memantau penyaluran bantuan pangan dan kesejahteraan pusat tepat sasaran, Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana kompak bersatu turun langsung ke lokasi penyaluran, Rabu (31/7/2020).

Bupati Subandi memantau penyaluran bantuan pangan di tiga desa di Kecamatan Cikong, yakni Desa Tesei, Desa Kelsumsikep, dan Desa Wahi. Sementara Wabup Mimik Idayana memantau penyaluran di Desa Sukokoyung, Kecamatan Buduran, dan Desa Jumpangrejo, Kecamatan Sukodono.

Selain untuk memastikan penyaluran bantuan beras tepat sasaran, Bupati Subandi juga ingin memastikan seluruh warga Sidoarjo terlindungi BPJS Kesehatan.

Bupati Subandi menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras kali ini untuk alokasi bulan Juni dan Juli. Perbulan pemerintah menyalurkan beras sebanyak 10 kg. Sehingga kali ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) langsung menerima 20 kilogram beras.

"Penyaluran bantuan pangan beras pemerintah pusat harus dikawal bersama. Jangan sampai bantuan tersebut salah sasaran atau diterima oleh yang tidak berhak. Bantuan harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Karena bantuan ini tujuannya untuk membantu ekonomi warga dalam mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari," kata Subandi.

Dia juga meyakinkan kualitas beras bantuan yang diberikan sangat baik. Beras jenis medium berkualitas. Bupati mengecek sendiri kondisi berasnya. Sangat layak dikonsumsi.



sumsi. Oleh karenanya ia meminta beras yang diterima dapat dikonsumsi sendiri. Jangan sampai dijual.

"Beras ini buat dikonsumsi dalam keluarga sendiri ngeh. Kalau pulang dari sini jangan mauper toko, terus beliannya dijual," pesan bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati H. Subandi juga memastikan masyarakat terlindungi BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jika masih ada yang belum, diminta agar segera menemui kepala desa setempat. Minta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Pesan serupa disampaikan Wabup Mimik Idayana saat monitoring bantuan pangan beras di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran dan Desa Jumpangrejo, Kecamatan Sukodono.

Wabup menegaskan bantuan beras untuk warga ini agar dikonsumsi sendiri dan tidak boleh dijual. "Saya pesan agar jangan dijual, manfaatkan untuk konsumsi sendiri," pesannya.

Mimik menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan distribusi bantuan sosial berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan.

Dalam kunjungannya, Mimik Idayana menyapa langsung warga penerima manfaat, memastikan proses pembagian berjalan tertib, dan mengecek kualitas beras yang diterima.

"Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, dalam kondisi layak konsumsi dan jumlah yang sesuai," ujarnya.

Kepada warga Mimik juga berpesan agar jika ada warga yang melihat jalan lubang, mati lampu, hingga warga yang butuh bantuan segera lapor agar segera ditindaklanjuti.

"Saya juga mohon agar bantu doa untuk pak Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo agar selalu sehat untuk memimpin Sidoarjo, dan menyejahterakan masyarakat Sidoarjo," pesan Wabup.

Siti Nurhayati (52), salah satu warga Jumpangrejo mengungkapkan rasa terima kasih karena bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarganya.

"Alhamdulillah dapat bantuan beras. Bisa buat hemat belanja. Terima kasih Bu Wabup dan pemerintah," ucapnya sambil tersenyum.

Hal serupa disampaikan Widarti, salah satu penerima

bantuan bersyukur kembali mendapatkan bantuan beras. Dua tahun lalu bantuan serupa juga diterimanya. Selama setahun ia memperoleh 10 kg beras setiap bulannya.

"Riyen nate angsal hampir setahun, terus wonten satu tahun setengah mboten angsal, sakniki baru angsal male," ucapnya.

Widarti mengungkapkan kalau bantuan tersebut sangat berarti baginya. Sangat membantu perekonomian dirinya yang harus berjuang sendiri semenjak suaminya meninggal.

Diungkapkannya bahwa sehari ia harus masak 1 kg beras untuk kebutuhannya

bersama tiga anaknya. "Alhamdulillah angsal bantuan beras ngeten niki, 10 kilo bisa dibuat 10 hari, sehari kulo masak 1 kilo beras damel tigo anak kulo," kata dia. (Khol/Ps)

POJOK KIRI

Pembangunan RSUD Sedati Telan Anggaran Rp 60 Miliar

SIDOARJO - Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati resmi dimulai sejak Senin (28/7). Proyek rumah sakit tipe D yang berdiri di bekas lokasi Puskesmas Sedati itu dibangun tiga lantai dengan kapasitas 50 tempat tidur. Anggaran pembangunannya disiapkan Rp miliar. Kepala Bidang Sumber

Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Sidoarjo dr Rahmi Afyanti Nisaul Khoiro mengatakan, pengerjaan konstruksi diberi tenggat 150 hari kerja.

"Sekarang masuk tahap pembangunan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dr Lakshmie Herawati Yuwan-



DESEMBER SELESAI: Para pekerja mulai membangun RSUD Sedati kemarin (31/7). Nantinya akan dibangun setinggi 3 lantai berkapasitas 50 tempat tidur.

tina menyampaikan, anggaran pembangunan RSUD Sedati mencapai Rp 60 miliar. Kontrak kerja dengan pelaksana proyek ditandatangani pada pertengahan Juli lalu. "RSUD ini dibangun tiga lantai dengan kapasitas 50 tempat tidur, sesuai standar rumah sakit tipe D," ungkapnya. (eza/uzi)

ANGGER BONDAN JAWA POS

Dinkes Pastikan Layanan Berobat Gratis Berjalan Lancar



PELAYANAN KESEHATAN: Salah satu warga kurang mampu yang terjangkit tumor ganas mendapat perhatian Pemkab Sidoarjo.

KOTA-Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo memastikan program prioritas Bupati Sidoarjo terkait layanan berobat gratis bisa dilaksanakan. Hal itu dimungkinkan karena Sidoarjo telah masuk kategori Universal Health Coverage (UHC).

Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo, dr. Danang Abdul Ghani mengatakan, cakupan kepesertaan aktif BPJS di Sidoarjo telah mencapai 77,14 persen. Angka itu berasal dari total 99,5 persen penduduk Sidoarjo yang sudah terdaftar BPJS.

"Artinya, sudah ada sekitar 1,6 juta penduduk yang aktif, ini modal kuat bagi Sidoarjo untuk menyukseskan layanan gratis," ucapnya, Rabu, (29/7).

Dengan capaian itu, warga bisa langsung berobat ke puskesmas meski tidak memiliki BPJS aktif. Layanan tersebut tetap bisa diakses

melalui mekanisme khusus.

"Jadi nanti ketika berobat ke puskesmas atau RS, BPJS-nya bisa langsung aktif," ujarnya.

Akan tetapi ada ketentuan yang harus dipenuhi. Warga harus bersedia masuk dalam golongan kelas tiga dan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). "Kalau kasusnya darurat, pelayanan medis tetap diutamakan," jelasnya.

Menurutnya, SKTM bisa menyusul dalam waktu 3x24 jam. Namun jika tidak darurat, warga diminta mengurus SKTM lebih dulu. "Warga yang elektif atau pengobatan terencana, harus urus SKTM terlebih dahulu," katanya.

Program ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Tak hanya di puskesmas, layanan gratis juga berlaku di rumah sakit.

● Ke Halaman 10



Dinkes Pastikan...

Layanan tersebut bisa diakses di rumah sakit pemerintah maupun swasta

yang bekerja sama dengan BPJS. Saat ini, Dinkes terus mendorong peningkatan kepesertaan aktif.

"Kami targetkan September nanti bisa

mencapai 80 persen kepesertaan aktif," paparnya. "Upaya ini terus kami maksimalkan melalui edukasi dan pemutakhiran data," pungkasnya. (sai/vga)



Cegah Banjir, Pemkab Rutin Bersihkan Sungai Kanal Porong

PORONG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus melakukan pembersihan rutin di Sungai Kanal Porong. Seperti yang dilakukan pada Selasa (29/7), Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Sidoarjo kembali menurunkan satu alat berat dan dua truk pengangkut sampah untuk membersihkan area sungai yang berada di titik crossing Jalan Raya Porong.

Pembersihan dilakukan dengan mengangkut berbagai jenis sampah, mulai dari tumbuhan liar hingga sampah rumah tangga, yang menumpuk dan menghambat aliran sungai. Untuk mempercepat proses norma-



ANTISIPASI BANJIR: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus melakukan pembersihan rutin di Sungai Kanal Porong.

lisasi, Satuan Tugas (Satgas) Sungai juga dikerahkan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo turut membantu kegiatan ini.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menjelaskan bahwa normalisasi Sungai Kanal Porong dilakukan secara rutin setiap minggu. Tumpukan sampah yang tersangkut di bawah jembatan menjadi fokus utama pembersihan.

"Saat ini debit air di Kanal Porong menurun karena adanya sistem giliran pemberian air (gilir atas dan gilir bawah), sehingga sampah

● Ke Halaman 10

Bupati Subandi Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Desa Wedi



Cegah Banjir...

yang ada di saluran menjadi lebih terhalang dan menumpuk," ujar Dwi saat memantau langsung kegiatan

pembersihan.

Ia menambahkan, upaya untuk mencegah penumpukan sampah terus dilakukan. Salah satu solusi yang telah dikoordinasikan dengan DLHK Si-

doarjo adalah pemasangan jaring di setiap perbatasan desa yang dilintasi aliran sungai.

"DLHK akan memasang jaring sungai di perbatasan desa dengan dukungan

dari pemerintah desa dan Dinas PU Bina Marga. Ini bertujuan untuk mencegah sampah terkonsentrasi di satu titik, seperti yang terjadi di area crossing Jalan Raya Porong," jelasnya.

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi beban penumpukan sampah dan menjaga kelancaran aliran air di Sungai Kanal Porong secara berkelanjutan. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



JPO Jenggolo Kumuh dan Bau Pesing

Jadi Tempat Tidur Gelandangan

SIDOARJO - Jembatan penyeberangan orang (JPO) Jenggolo dikeluhkan sejumlah warga. Kondisi JPO nampak kurang terawat, bau hingga gelap saat malam hari

TAK TERAWAT: Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jenggolo banyak coretan dan terlihat kumuh kemarin (31/7). Dishub masih merencanakan perbaikan.

membuat warga tidak nyaman saat hendak menyeberang. "Saya sebenarnya agak takut lewat JPO, karena kadang ada orang tidur di tangga," ujar Adien, salah satu pengguna JPO. Menurut remaja 17 tahun itu, lokasi JPO sering menjadi persinggahan orang dengan gangguan jiwa (ODG) hingga tuna wisma.

"Saya lewat kadang bau pesing, tapi nggak ada opsi lain buat nyeberang, jadi mau tidak mau harus lewat sana," katanya. Dari pantauan, nampak sejumlah coretan vandalisme meng-

hiasi tembok tangga JPO. Di malam hari lampu di lorong jembatan juga mati.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Benny Alklinger Negaswara mengatakan, tahun ini belum ada rencana untuk merenovasi JPO Jenggolo. "Tahun ini belum ada rehab, tapi info tersebut akan segera kami tindak lanjuti," katanya.

Benny mengakui sudah lama JPO Jenggolo tidak diperbaiki. "Kami masih rencanakan, termasuk tambahan ornamen untuk memper-cantik" ujannya. (eza/uzi)

Jawa Pos